



**Kalteng Penuh Berkah**

**PEMERINTAH DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)  
TAHUN 2023**



**BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT  
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
Jalan RTA. Milono No. 1 Telp.(0536) 3228822  
Faks. (0536) 3228822  
Email : rokesra.kalteng.@gmail.com

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat karunia dan hidayahNya, Sehingga Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 ini dapat diselesaikan.

Penyusunan laporan ini merupakan wujud pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dari Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 sesuai dengan VISI, MISI dan FUNGSI.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, Akhirnya kami mengharapkan masukan dan saran yang dapat membangun Kinerja untuk lebih baik lagi untuk masa yang akan datang.

Palangka Raya, Januari 2024

Plt. KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT  
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,



**AHMAD PAHRUKA, S.Pd., M.MP**

Pembina

NIP. 197302121999091001

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATAPENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	2
C. ASPEK STRATEGIS .....	4
D. STRUKTUR ORGANISASI.....	7
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	12
A. VISI DAN MISI .....	12
B. TUJUAN DAN SARAN.....	13
C. INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	14
D. PERJANJIAN KINERJA.....	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	18
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020.....	18
B. URAIAN PENCAPAIAN KINERJA .....	21
C. ASPEK KEUANGAN .....	21
D. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH.....	23
BAB IV PENUTUP .....	20
A. KESIMPULAN .....	20
B. SARAN .....	20
C. LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	20

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah, Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar.

Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas penyusunan bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang kesejahteraan rakyat, perencanaan strategis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi, pembinaan mental spiritual, pembinaan sosial, pembinaan kemasyarakatan, pembinaan kesehatan dan kesejahteraan serta penyelenggaraan sistem informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Bagian Kelembagaan Bina Spritual, Bagian Sarana dan Prasarana Spritual, Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar dan Bagian Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar, serta tugas-tugas lain yang dilaksanakan dengan instruksi/petunjuk pimpinan.

Dari Rencana Strategis sesuai Tugas dan Fungsi serta Akuntabilitas Kinerja dapat digambarkan secara umum bahwa Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 telah melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya secara maksimal.

## **B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Tugas Pokok dan Fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat seperti yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 01 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah :

### a. Kedudukan

Biro Kesejahteraan Rakyat adalah Lembaga Pemerintah, yang berkedudukan di bawah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Kalimantan Tengah. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah 01 Tahun 2020 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

### 2. Tugas Pokok

Berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 01 Tahun 2020 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Pasal 24 Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas dalam penyiapan pengoordinasian

perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar.

### 3. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 01 Tahun 2020.

Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar;
- b. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar;
- c. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang memengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar;

- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

### **C. ASPEK STRATEGIS**

1. Terbentuknya Biro Kesejahteraan Rakyat SETDA Provinsi Kalimantan Tengah melalui Perda Nomor 5 Tahun 2008 dan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 18 Tahun 2008 tanggal 1 Juli 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Adanya Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 01 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah.
3. Tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan.
4. Tersedianya sumber daya manusia.
5. Tersedianya peralatan Kantor yang mendukung dalam rangka penyelesaian pelaksanaan tugas.
6. Tersedianya Mobilitas guna mendukung pelaksanaan tugas.

Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 01 Tahun 2020 Biro Kesejahteraan Rakyat SETDA Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari :

#### **1. Bagian Bina Mental Spiritual**

Bagian Bina Mental Spiritual menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non

- pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar;
- b. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar;
  - c. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang memengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar;
  - d. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan haji;
  - e. pengumpulan dan pengolahan data lembaga keagamaan;
  - f. penyusunan pedoman pembinaan kehidupan beragama;
  - g. pengumpulan dan pengolahan data jumlah penduduk umat beragama; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.



## **2. Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar :**

Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar I, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar II, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar III;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar I, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar II, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar III;
- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang memengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar I, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar II, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar III ; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

### **3. Bagian Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar**

Bagian Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kesehatan, sosial dan pendidikan;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kesehatan, sosial dan pendidikan;
- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang memengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesehatan, sosial dan pendidikan;
- d. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan bidang kesehatan, sosial dan pendidikan;
- e. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan bidang kesehatan, sosial dan pendidikan;
- f. pengoordinasian pelaksanaan tugas dengan instansi lain terkait yang menangani bidang kesehatan, sosial dan pendidikan;
- g. fasilitasi dan koordinasi, penyelenggaraan sistem informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan, sosial dan pendidikan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengantugasnya.

#### **D. STRUKTUR ORGANISASI**

Struktur Organisasi Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 01 Tahun 2020 sebagai berikut :

1. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dengan jabatan eselon II.b
2. Kepala Bagian dengan Jabatan eselon III.a
  - a. Bagian Bina Mental Spiritual terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian :
    1. Sub Bagian Tata Usaha Biro
    2. Sub Bagian Sarana dan Prasarana Spiritual
    3. Sub Bagian Kelembagaan Bina Spiritual
  - b. Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian :
    1. Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar I
    2. Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar II
    3. Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar III
  - c. Bagian Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian :
    1. Sub Bagian Kesehatan
    2. Sub Bagian Sosial
    3. Sub Bagian Pendidikan

### **Sumberdaya Manusia**

Sumberdaya manusia pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah diklasifikasikan kedalam jenjang minimal SLTP atau Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan jenjang paling puncak yaitu jenjang Sarjana S2. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat dilihat di tabel 1.1

**Tabel 1.1**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan**

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah		Total	Ket
		L	P		
1	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	1	0	1	
2	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	3	4	7	
3	Diploma Satu (D-1)	0	0	0	
4	Diploma Tiga (D-3)	1	1	2	
5	Sarjana (S-1)	5	9	15	
6	Sarjana (S-2)	3	2	5	
7	Sarjana (S-3)	0	0	0	
	<b>Jumlah</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>28</b>	

Keterangan: \*) tidak termasuk Pegawai kontrak.

Dari jumlah pegawai sebanyak 28 orang ini kemudian ditentukan komposisi pegawai berdasarkan pangkat golongan.

**Tabel 1.2**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat Golongan**

No	Pangkat dan Golongan	Jumlah		Total	Ket
		L	P		
1	I/d Juru Tingkat I	0	0	0	
2	II/a Pengatur Muda	0	0	0	*)
3	II/b Pengatur Muda Tk. I	0	0	0	
4	II/c Pengatur	1	0	1	
5	II/d Pengatur Tk. I	1	3	4	
6	III/a Penata Muda	2	2	4	
8	III/b Penata Muda Tk.I	0	1	1	

9	III/c	Penata	4	2	6	
10	III/d	Penata Tk. I	1	8	9	
11	IV/a	Pembina	1	0	1	
12	IV/b	Pembina Tk. I	2	0	2	
13	IV/c	Pembina Utama Muda	0	0	0	
14	IV/c	Pembina Utama Madya	0	0	0	
15	IV/e	Pembina Utama	0	0	0	
		<b>Jumlah</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>28</b>	

Keterangan: \*) Tidak termasuk Pegawai kontrak/honorar.

Komposisi pegawai berdasarkan jabatan struktural dan fungsional untuk menentukan seberapa besar tanggung jawab yang diemban pegawai. Seperti kita lihat di tabel 1.3 jabatan eselon II ke bawah sebagai berikut :

**Tabel 1.3**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional**

No	Struktur dan Fungsional	Jumlah		Total
		L	P	
1	Eselon I	0	0	0
2	Eselon II.b	0	0	0
3	Eselon III.a	0	1	1
4	Eselon IV.a	3	0	3
5	Fungsional	2	6	8
6	Non Struktural / Fungsional	7	9	16
	<b>Jumlah</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>28</b>

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. VISI DAN MISI**

##### **a. Visi**

Visi Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah adalah " Terwujudnya peran Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan, terwujudnya koordinasi-koordinasi, Fasilitasi, Evaluasi, dan monitoring, bidang Kesra dan Kemasyarakatan untuk mencapai pembangunan Kalimantan Tengah Kalteng Berkah".

##### **b. Misi :**

1. Mewujudkan terciptanya kualitas pendidikan, kesehatan, agama dan mental spiritual manusia.
2. Meningkatkan perlindungan sosial dan kemasyarakatan
3. Meningkatkan kesehatan, kualitas lingkungan hidup dan transmigrasi.
4. Meningkatkan pelestarian budaya, pariwisata, dan pembinaan pemuda dan olahraga.
5. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan anak.
6. Menyelenggarakan program-program khusus masalah-masalah kesra dan sosial.

## **B. TUJUAN DAN SASARAN**

### **a. Tujuan**

1. Meningkatnya pelaksanaan dan pelayanan administrasi bidang Bina Keagamaan, Bina Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Komunikasi, Informatika, Statistik, Persendian dan Perhubungan, Bina Sosial, Kesehatan, Pendidikan.
2. Meningkatnya penyusunan bahan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan tugas Bina Keagamaan, Bina Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Komunikasi, Informatika, Statistik, Persendian dan Perhubungan, Bina Sosial, Kesehatan, Pendidikan;
3. Meningkatnya penyusunan bahan penyelenggara system informasi bidang kesejahteraan;
4. Meningkatnya pengelola urusan tata usaha dan rumah tangga biro; dan
5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

## b. Sasaran

Berdasarkan atas tujuan, selanjutnya Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah menjabarkan sasaran – sasaran yang akan dicapai secara tahunan periode renstra. Sasaran dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis.

Sasaran Strategis dan indikator Kinerja dapat dilihat ditabel berikut:

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Meningkatnya Pelayanan Penunjang Urusan Kesejahteraan Rakyat	- Persentase Keterlaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase	100	100	100	100	100	100
		- Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Biro Kesra	Dokumen	100	100	100	100	100	100
		- Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Biro Kesra	Dokumen	100	100	100	100	100	100
		- Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Biro Kesra	Dokumen	100	100	100	100	100	100
		- Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Biro Kesra	Dokumen	100	100	100	100	100	100
		- Tersedianya Administrasi Umum Biro Kesra	Bulan	100	100	100	100	100	100
		- Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Kesejahteraan Rakyat	Bulan	100	100	100	100	100	100
		- Jumlah Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan dan Meningkatkan Kualitas Beribadah	Persentase	100	100	100	100	100	100
2.	Meningkatnya Fasilitas Pengembangan Kesejah-	- Jumlah Fasilitas Pembinaan Mental Spritual	Kegiatan	100	100	100	100	100	100



teraan Rakyat dan Kualitas Beribadah	- Jumlah Fasilitas Pengembangan Kesra Pelayanan Dasar	Kegiatan	100	100	100	100	100	100
	- Jumlah Fasilitas Pengembangan Kesra Non Pelayanan Dasar	Kegiatan	100	100	100	100	100	100
	- Persentase Keterlaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase	100	100	100	100	100	100

### C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja adalah ukuran Kuantitatif dan Kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Kegiatan yang akan di tetapkan kedalam Kelompok Masukan (Input) Keluaran (Output) dan Hasil (Outcome), Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan Berdasarkan pada Perkiraan yang Realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang di tetapkan serta data pendukung.

Tabel Indikator Kinerja Utama Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Pelayanan Penunjang Urusan Kesejahteraan Rakyat	- Persentase Keterlaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase
		- Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Biro Kesra	Dokumen
		- Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Biro Kesra	Dokumen

		- Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Biro Kesra	Dokumen
		- Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Biro Kesra	Dokumen
		- Tersedianya Administrasi Umum Biro Kesra	Bulan
		- Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Kesejahteraan Rakyat	Bulan
		- Jumlah Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat dan Meningkatkan Kualitas Beribadah	Persentase
2.	Meningkatnya Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat dan Kualitas Beribadah	- Jumlah Fasilitas Pembinaan Mental Spritual	Kegiatan
		- Jumlah fasilitas Pengembangan Kesra Pelayanan Dasar	Kegiatan
		- Jumlah Fasilitas Pengembangan Kesra Non Pelayanan Dasar	Kegiatan
		- Persentase Keterlaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase

#### **D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Penetapan Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen

antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja, dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

Tabel Perjanjian Kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Pelayanan Penunjang Urusan Kesejahteraan Rakyat	- Persentase Keterlaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100	Persentase
		- Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Biro Kesra	100	Dokumen
		- Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Biro Kesra	100	Dokumen
		- Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Biro Kesra	100	Dokumen
		- Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Biro Kesra	100	Dokumen
		- Tersedianya Administrasi Umum Biro Kesra	100	Bulan

		- Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Kesejahteraan Rakyat	Bulan	100
		- Jumlah Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat dan Meningkatkan Kualitas Beribadah	Persentase	100
2.	Meningkatnya Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	- Jumlah Fasilitas Pembinaan Mental Spritual	Kegiatan	100
		- Jumlah fasilitas Pengembangan Kesra Pelayanan Dasar	Kegiatan	100
		- Jumlah Fasilitas Pengembangan Kesra Non Pelayanan Dasar	Kegiatan	100
		- Persentase Keterlaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase	100

Tabel Program dan Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 :

No.	Program	Anggaran
	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	3,365,000,000
2	Program Kesejahteraan Rakyat	129,668,745,240
<b>JUMLAH</b>		<b>133,033,745,240</b>

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

##### A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

Tingkat capaian kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023 untuk seluruh indikator dapat ditunjukkan dalam tabel berikut.

<b>Sasaran strategis 1</b> : Terlaksana dan Terkoordinasinya pelayanan secara terpadu antara pemerintah pusat dan daerah.				
<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>	
<b>➤ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>				
a. Persentase Keterlaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	96 %	96 %	100	
b. Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Biro Kesra	7 Dokumen	7 Dokumen	100	
c. Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Biro Kesra	4 Dokumen	4 Dokumen	100	
d. Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Biro Kesra	2 Dokumen	2 Dokumen	100	
e. Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Biro Kesra	21 Dokumen	21 Dokumen	100	
f. Tersedianya Administrasi Umum Biro Kesra	12 Bulan	12 Bulan	100	
g. Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Kesejahteraan Rakyat	12 Bulan	12 Bulan	100	
h. Jumlah Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat dan Meningkatkan Kualitas Beribadah	9 Kegiatan	9 Kegiatan	100	
<b>Sasaran Strategis 2</b> : Terlaksana dan Terasilitasinya kegiatan – kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat				

➤ Program Kesejahteraan Rakyat			
a. Fasilitasi Pembinaan Mental Spritual	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100
b. Fasilitasi Pengembangan Kesra Pelayanan Dasar	9 Kegiatan	9 Kegiatan	100
c. Fasilitasi Pengembangan Kesra Non Pelayanan Dasar	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100
d. Persentase Keterlaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	96 %	96 %	100

## B. URAIAN PENCAPAIAN KINERJA

Pengukuran Capaian Kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja sasaran. Metode Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja yang diinginkan dengan realisasi kinerja yang dicapai organisasi. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa mendatang.

## C. ASPEK KEUANGAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Tahun 2022 Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah didukung oleh anggaran yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2023 sebesar **Rp. 133,033,745,240,-** (Seratus Tiga Puluh Tiga Milyar Tiga Puluh Tiga Ratus Juta Tujuh Puluh Empat Ribu Lima Ratus Dua Empat Puluh Rupiah).

NO.	Uraian	Jumlah (Rp.)
<b>BELANJA OPERASI</b>		
1.	Belanja Pegawai	185,760,000,-
2.	Belanja barang dan Jasa	17,523,153,240,-
3.	Belanja Hibah	114,300,000,000,-
<b>BELANJA MODAL</b>		
4.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,024,832,000,-
<b>Total</b>		<b>133,033,745,240,-</b>

#### **D. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH.**

Agar pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan secara optimal maka pada tahun 2023 perlu diupayakan strategi pemecahan masalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia.
2. Penyediaan dana melalui APBD dan APBN yang memadai guna menjaga jaringan dengan mengupayakan peningkatan dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 ini disusun sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik target yang telah ditetapkan.

Dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini tergambar bahwa kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 dapat tercapai dengan optimal dengan kategori capaian sangat baik. Namun walaupun pencapaian kinerja sudah optimal, kami merasa masih perlu untuk meningkatkan kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di tahun-tahun mendatang, dalam rangka upaya mendukung Visi, Misi, Program Pembangunan Kalimantan Tengah dan pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017-2022.



**B. SARAN**

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini masih jauh dari sempurna dan dimasa mendatang Biro Kesejahteraan Rakyat akan mengambil langkah-langkah yang kebijakan strategis yang tepat dan terencana baik dalam hal penyusunan menyusun program dan anggaran maupun kualitas sumber daya manusianya.

Demikian laporan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Biro Kesejahteraan Rakyat SETDA Provinsi Kalimantan Tengah, dibuat sebagai perwujudan pertanggung jawaban Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan sekaligus sebagai alat kendali penilaian kualitas kinerja.

**C. LAMPIRAN-LAMPIRAN :**

- LAPORAN KINERJA 2023
- LAPORAN KEUANGAN 2023

Palangka Raya, Januari 2024

Pit. KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT  
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,



**AHMAD PAHRUKA, S.Pd., M.MP**  
Pembina  
NIP. 197302121999091001

**LAMPIRAN : LAPORAN TRIWULAN IV TAHUN 2023**  
**Nama SKPD : BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**A. LAPORAN KINERJA**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Target Capaian Triwulan IV		Ket	
					Target	Realisasi		Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>➤ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI</b>								
<b>1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah</b>								
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan	Dokumen	2	1	1	100	
b.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA	Dokumen	5	5	5	100	
c.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Dokumen	5	5	5	100	
d.	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesra	Dokumen	5	5	5	100	
<b>2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>								
a.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi Bidang Kesra dengan baik	Dokumen	5	5	5	100	
b.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun dengan baik	Dokumen	5	5	5	100	
c.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran dengan baik	Dokumen	5	5	5	100	

<b>3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>						
a.	Panatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersusunnya Laporan Penatausahaan BMD	Dokumen	2	2	100
<b>4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>						
a.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tersusunnya Laporan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	3	3	100
b.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Diklat yang diikuti	Dokumen	3	3	100
c.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bimtek/Sosialisasi/Rapat yang diikuti	Dokumen	3	3	100
<b>5. Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						
a.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Modal Peralatan /Alat Tulis Kantor	Bulan	12	12	100
b.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan	Tersedianya Barang Cetak dan Pengadaan	Bulan	12	12	100
<b>6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						
a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	12	100
b.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Internet	Bulan	12	12	100
c.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	12	100
d.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	12	100

➤ PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT									
<b>1. Fasilitas Pembinaan Mental Spritual</b>									
a.	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spritual	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spritual yang dikelola dengan baik	Kegiatan	5	5	5	5	5	100
b.	Fasilitas Kelembagaan Bina Spritual	Jumlah Fasilitas Kelembagaan Bina Spritual	Kegiatan	5	5	5	5	5	100
<b>2. Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar</b>									
a.	Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Fasilitas Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Kegiatan	3	3	3	3	3	100
b.	Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Kegiatan	3	3	3	3	3	100
c.	Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Fasilitas Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Kegiatan	3	3	3	3	3	100
<b>3. Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar</b>									
a.	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Fasilitas Kesra Non Pelayanan Dasar I	Kegiatan	3	3	3	3	3	100

b.	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Fasilitas Kesra Non Pelayanan Dasar I	Kegiatan	3	3	3	100
c.	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persendian dan Perhubungan	Jumlah Fasilitas Kesra Non Pelayanan Dasar I	Kegiatan	3	3	3	100

Pit. KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT  
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,



**AHMAD PAHRUKA, S.Pd., M.MP**

Pembina

NIP. 197302121999091001

LAMPIRAN : LAPORAN TRIWULAN IV TAHUN 2023  
 Nama SKPD : BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

**B. REALISASI KEUANGAN**

No.	Program	Kegiatan	Sub Bagian	Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan (Rp.)			Ket
					Target	Realisasi	Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
➤	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI</b>			<b>3.365.000.000,-</b>				
	<b>1.</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah</b>		<b>475.000.000,-</b>				
		a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.000.000,-	25.000.000	24.889.000	99,56	
		b.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	25.000.000,-	25.000.000	24.584.000	98,34	
		c.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.000.000,-	24.911.000	20.410.000	81,93	
		d.	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	400.000.000,-	395.000.000	394.652.760	99,91	
	<b>2.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>75.000.000,-</b>				
		a.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	25.000.000,-	24.911.000	20.195.000	81,07	
		b.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	25.000.000,-	24.911.000	23.450.000	94,14	
		c.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	25.000.000,-	24.911.000	24.440.000	98,11	

<b>3.</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>50.000.000,-</b>			
	a. Panatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	50.000.000,-	50.000.000	48.001.000	96,00
<b>4.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>125.000.000,-</b>			
	a. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	25.000.000,-	24.911.000	24.144.000	96,92
	b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000,-	50.000.000	50.000.000	100,00
	c. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	50.000.000,-	50.000.000	19.678.060	39,36
<b>5.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.900.000.000,-</b>			
	a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.175.000.000,-	1.269.498.500,-	1.159.397.500,-	91,33
	b. Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan	25.000.000,-	25.000.000,-	25.000.000,-	100,00
	c. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	700.000.000,-	699.411.775,-	699.411.775,-	100,00
<b>6.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>740.000.000,-</b>			
	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-	100,00
	b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.000.000,-	50.000.000,-	49.834.000,-	99,42
	c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	150.000.000,-	130.180.000,-	122.910.442,-	98,11
	d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	535.000.000,-	528.386.398,-	518.386.398,-	91,52

<b>PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>		<b>129.668.745.240,-</b>		
<b>1.</b>	<b>Fasilitasi Pembinaan Mental Spritual</b>	<b>127.668.745.240,-</b>		
	a. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spritual	126.968.745.240,-	103.498.110.143,-	91,30
	b. Fasilitasi Kelembagaan Bina Spritual	700.000.000,-	698.110.117,-	100,00
<b>2.</b>	<b>Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar</b>	<b>1.000.000.000,-</b>		
	a. Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	250.000.000,-	249.917.412,-	100,00
	b. Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	500.000.000,-	495.263.053,-	100,00
	c. Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	250.000.000,-	249.958.178,-	100,00
<b>3.</b>	<b>Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar</b>	<b>1.000.000.000,-</b>		
	a. Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	250.000.000,-	249.952.874,-	100,00
	b. Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	500.000.000,-	498.425.739,-	100,00



	c.	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persendian dan Perhubungan	250.000.000,-	246.399.975,-	246.399.975,-	100,00	
--	----	--	---------------	---------------	---------------	--------	--

Pit. KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT  
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,



**AHMAD PAHRUKA S. Pd., M.M.P.**  
Pembina  
NIP. 197302121999091001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
**SEKRETARIAT DAERAH**

BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT  
Jalan RTA. Milono Nomor 01 Palangka Raya 73111  
Telp. 3221538 – 3221214 – (0536) 3228822 dan Fax 3228822

**REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **AHMAD PAHRUKA, S.Pd.,M.MP**

Jabatan : Pit. KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROVINSI  
KALIMANTAN TENGAH

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. H. NURYAKIN, M.Si**

Jabatan : SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik maka perlu untuk menetapkan indikator kinerja utama tahun 2021-2026 sebagaimana terlampir.

Demikian Penetapan Indikator Kinerja Utama ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan kinerja.

Palangka Raya, Oktober 2023

Pihak Kedua  
SEKRETARIS DAERAH,



**Drs. H. NURYAKIN, M.Si**  
NIP. 196506101991031025

Pihak Pertama  
Pit. KEPALA BIRO KESRA,



**AHMAD PAHRUKA, S.Pd.,M.MP**  
NIP. 197302121999091001



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

**BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT**

Jalan RTA. Milono Nomor 01 Palangka Raya 73111  
Telp. 3221538 – 3221214 – (0536) 3228822 dan Fax 3228822

---

**REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

Unit : BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Tugas dan Fungsi :

Berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 01 Tahun 2020 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Pasal 24 Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar.

Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar;
- b. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar;
- c. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang memengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Cara Perhitungan	Sumber Data
1.	Meningkatnya Pelayanan Penunjang Urusan Kesejahteraan Rakyat	- Persentase Keterlaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase dari realisasi keuangan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	RENSTRA DAN DPA-SKPD
2.	Meningkatnya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Dan Kualitas Beribadah	- Jumlah Dokumen Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat dan Peningkatan Kualitas Beribadah	Dokumen Kegiatan Realisasi Dokumen Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat dan Peningkatan Kualitas Beribadah	RENSTRA DAN DPA-SKPD

Palangka Raya, Oktober 2023

Pihak Kedua,  
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. H. NURYAKIK, M.Si  
NIP. 1965061019901031025

Pihak Pertama,  
Plt. KEPALA BIRO KESRA,



AHMAD PAHRUKA, S.Pd.,M.MP  
NIP. 197302121999091001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
**SEKRETARIAT DAERAH**

BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT  
Jalan RTA. Milono Nomor 01 Palangka Raya 73111  
Telp. 3221538 – 3221214 – (0536) 3228822 dan Fax 3228822

**REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **AHMAD PAHRUKA, S.Pd.,M.MP**

Jabatan : **Pit. KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. H. NURYAKIN, M.Si**

Jabatan : **SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Oktober 2023

Pihak Kedua,  
SEKRETARIS DAERAH

**Drs. H. NURYAKIN, M.Si**  
NIP. 196506101991031025



Pihak Pertama,  
Pit. KEPALA BIRO KESRA,

**AHMAD PAHRUKA, S.Pd.,M.MP**  
NIP. 197302121999091001





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
**SEKRETARIAT DAERAH**

BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

Jalan RTA. Milono Nomor 01 Palangka Raya 73111  
Telp. 3221538 – 3221214 – (0536) 3228822 dan Fax 3228822

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Pelayanan Penunjang Urusan Kesejahteraan Rakyat	- Persentase Keterlaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase	94
2.	Meningkatnya Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat dan Kualitas Beribadah	- Jumlah Dokumen Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat dan Peningkatan Kualitas Beribadah	Dokumen Kegiatan	12

Program

Anggaran

Keterangan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Rp. 3.365.000.000
2. Program Kesejahteraan Rakyat Rp. 206.434.446.638

Palangka Raya, Oktober 2023

Pihak Kedua  
SEKRETARIS DAERAH

Drs. H. NURYAKIN, M.Si  
NIP. 19650610191051025



Pihak Pertama  
Pit. KEPALA BIRO KESRA

AHMAD PAHRUKA, S.Pd., M.MP  
NIP. 197302121993091001





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
**SEKRETARIAT DAERAH**

BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT  
Jalan RTA. Milono Nomor 01 Palangka Raya 73111  
Telp. 3221538 – 3221214 – (0536) 3228822 dan Fax 3228822

RENCANA AKSI PELAPORAN KINERJA DAN PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **AHMAD PAHRUKA, S.Pd.,M.MP**

Jabatan : PIt. KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROVINSI  
KALIMANTAN TENGAH

Berjanji akan membuat Laporan Capaian Kinerja per Triwulan (Laporan Triwulan) sesuai dengan Dokumen Rencana Aksi Pelaporan dan Pengukuran Kinerja ini sebagai pengendalian dan pemantauan progress kemajuan kinerja selama satu tahun. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami bersama.

Palangka Raya, Oktober 2023

PIt. KEPALA BIRO KESRA,



**AHMAD PAHRUKA, S.Pd.,M.MP**  
NIP. 197802111899091001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
**SEKRETARIAT DAERAH**

BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT  
Jalan RTA, Milono Nomor 01 Palangka Raya 73111  
Telp. 3221538 – 3221214 – (0536) 3228822 dan Fax 3228822

**A. Target Realisasi Kinerja**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Target Realisasi Kinerja				Ket
					TW I	TW II	TW III	TW IV	
1.	Meningkatnya Pelayanan Penunjang Urusan Kesejahteraan Rakyat	- Persentase Keterlaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase	94	20	30	30	14	
2.	Meningkatnya Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat dan Kualitas Beribadah	- Jumlah Dokumen Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat dan Peningkatan Kualitas Beribadah	Dokumen Kegiatan	12	-	3	7	2	



B. Target Realisasi Keuangan

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Target Realisasi Keuangan (Rp.)				Ket
				TW I	TW II	TW III	TW IV	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		3.365.000.000					
	1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	475.000.000	118.750.000	118.750.000	118.750.000	118.750.000	
	2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	75.000.000	87.750.000	87.750.000	87.750.000	87.750.000	
	3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	50.000.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	
	4.	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	125.000.000	31.250.000	31.250.000	31.250.000	31.250.000	
	5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.900.000.000	475.000.000	475.000.000	475.000.000	475.000.000	
	6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	740.000.000	185.000.000	185.000.000	185.000.000	185.000.000	
2.	Program Kesejahteraan Rakyat		206.434.446.638					
	1.	Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual	204.584.446.638	51.146.111.659	51.146.111.659	51.146.111.659	51.146.111.659	
	2.	Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	850.000.000	212.500.000	212.500.000	212.500.000	212.500.000	
	3.	Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	1.000.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
**SEKRETARIAT DAERAH**

BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

Jalan RTA. Milono Nomor 01 Palangka Raya 73111  
Telp. 3221538 – 3221214 – (0536) 3228822 dan Fax 3228822

**RENCANA KINERJA TAHUNAN 2024**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Pelayanan Penunjang Urusan Kesejahteraan Rakyat	- Persentase Keterlaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	96
2.	Meningkatnya Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat dan Kualitas Beribadah	- Jumlah Dokumen Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat dan Peningkatan Kualitas Beribadah	Dokumen Kegiatan	13

Palangka Raya, Oktober 2023

Pihak Pertama,  
PIT KEPALA BIRO KESRA,



AHMAD PAHRUKA, S.Pd., M.MP  
NIP. 197302121999091001